

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh rakyat merupakan pembangunan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan, untuk mengacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain. Peranan pemerintah sangat penting untuk tercapainya pembangunan nasional secara merata baik dari pusat, provinsi dan daerah atau kabupaten kota.

Dalam pembangunan sistem ekonomi pengelolaan pemerintah Indonesia memasuki era baru, yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat di daerah (Siswanto, 2008). Tujuan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Abddurahman, 1997).

Otonomi daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga disertai dengan pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Seperti dikemukakan oleh Rondinelli, Collough dan Johnson (1983:73), secara teoritis kemampuan daerah untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan, merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kualitas ekonomi yang dimiliki atau dengan kata lain, semakin besar kontribusi pendapatan daerah sendiri terhadap anggaran belanja daerah, maka kualitas otonomi daerah semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, bila semakin besar “subsidi” pemerintah pusat terhadap anggaran belanja daerah, maka akan mengakibatkan semakin meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang pada akhirnya akan memperlambat eksistensi otonomi daerah.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan tersebut diperlukan pendanaan. Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Mamuka dan Inggriani, 2014).

Menurut (Jaya dan Dwirandra,2014), menyebutkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan

pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan belanja modal. Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan pemerintah yang harus dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam menggali potensi daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah juga perlu memahami darimana sumber keuangan daerah diperoleh. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dialokasikan untuk kegiatan pelayanan kepada publik yang merupakan salah satu harapan masyarakat kepada pemerintah dalam era desentralisasi.

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi NTT Di bagian tenggara provinsi. Berdasarkan wilayahnya batas-batas Kota Kupang adalah, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Tabenu Kabupaten Kupang. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese.

Pemerintah salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi yang modern, pemerintah juga memiliki kekuatan serta mengatur dan mengawasi perekonomian, disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat di laksanakan oleh

rumah tangga dan perusahaan yang sarannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat lewat pelayan publik yang adil dan merata. Peningkatan pelayanan publik yang dimaksud salah satunya adalah dengan pemberian proporsi belanja modal yang lebih besar. Setelah desentralisasi yang di berikan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharapkan bisa menciptakan kreasi baru untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing daerah. Kota Kupang menunjukkan adanya kemajuan dalam mengelola aset daerah hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan pada sepuluh tahun terakhir. Penerimaan pendapatan asli daerah paling besar yaitu dari sektor pajak, yang diikuti dengan penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut adalah tabel dari anggaran pendapatan dan Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang tahun 2003-2017.

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang  
2003-2017.

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
1	2003	15.717.261.665	19.270.462.470
2	2004	12.779.127.000	18.882.244.000
3	2005	18.395.584.000	44.290.565.000
4	2006	25.427.999.966	76.861.737.900
5	2007	30.659.877.562	80.562.564.080
6	2008	27.891.568.000	73.918.543.000
7	2009	36.191.439.000	81.567.670.000
8	2010	39.010.009.000	113.165.588.000
9	2011	47.638.337.000	81.097.733.000
10	2012	66.638.337.000	58.249.003.000
11	2013	80.729.275.000	98.061.727.000
12	2014	113.032.804.000	122.955.020.000
13	2015	145.154.792.000	151.327.467.000
14	2016	165.449.023.000	237.652.322.000
15	2017	229.137.474.000	306.295.066.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa untuk pendapatan asli daerah dari tahun 2003-2017 yang mengalami penurunan hanya tahun 2004 dan tahun 2008, sedangkan untuk tahun 2009-2017 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 229.137.474.000. Peningkatan pendapatan asli daerah ini karena adanya kemajuan di sektor tertentu misalnya pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada pajak hotel,

restoran, dan reklame. Pada tahun 2016 juga adanya peningkatan di sektor pariwisata dan juga investasi di Kota Kupang terus mengalami pertumbuhan yang positif khususnya investasi usaha perbelanjaan.

Belanja Modal Kota Kupang dari tahun 2003-2012 dari tahun setiap tahun mengalami peningkatan dan penurunan, belanja modal terendah pada tahun 2004 yang hanya berjumlah Rp18.882.244.000. Pada tahun 2008 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2012 yang hanya berjumlah Rp 58.249.003.000. Dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2013 dengan jumlah belanja modal Rp 98.061.727.000, peningkatan belanja modal ini berlanjut sampai pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan, pemerintah Kota Kupang mampu mengelola dan merealisasikan potensi ekonomi yang ada di daerah menjadi bentuk kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang nantinya membiayai pembangunan daerah. Dengan meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang?
2. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah Kota Kupang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pendapatan asli dan belanja modal pemerintah di Kota Kupang. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

### **1.4.1 Bagi Institusi**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai Pendapatan asli daerah dan belanja modal.

### **1.4.2 Bagi Peneliti**

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pendapatan asli daerah dan belanja modal di Kota Kupang dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1 Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.